

IPTeKS PROSES BISNIS KEUANGAN PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SULUTTENGGGO

Ignatius Ramot Hutagalung¹, Caesar Junior Mongi², Jessy D.L Warongan³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : ignatiusramot2@gmail.com

ABSTRACT

PT. PLN (Persero) as a State Company engaged in electricity business in Indonesia. Meanwhile PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo is a branch unit for North Sulawesi, Central Sulawesi and Gorontalo region. The business of PT. PLN (Persero) is a monopoly market making the company obligated to take care of everything in electricity field. The business is growing rapidly, so that PT. PLN (Persero) has to keep up with the existing development. Therefore PT. PLN (Persero) is having a lot of business cooperation with many different Vendors. Before doing a cooperation, both the PT. PLN (Persero) and Vendor made a contract. After the works is done by the Vendor, the Vendor will send a bill to a User. The User will then proceed it. The process named as Financial Business Processes.

Keywords : Financial Business Processes, Electricity Business

1. PENDAHULUAN

Listrik merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Tanpa listrik barang-barang elektronik tidak akan dapat berfungsi. Aset-aset penting tidak dapat bekerja, seperti rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan lain-lain. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang pesat secara tidak langsung membuat bisnis kelistrikan menjadi semakin penting. Oleh karena itu PT. PLN (Persero) hadir ditengah masyarakat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memenuhi kebutuhan tersebut. PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa ketenagalistrikan di Indonesia. PLN merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Berdasarkan definisi dari Satia Lubis (2006) menjadikan pasar bisnis yang dimasuki oleh PLN adalah Pasar Monopoli. Oleh karena itu, PLN berkewajiban untuk mengelola segala aspek ketenagalistrikan. Unit PT. PLN (Persero) dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Kelompok Unit Wilayah
2. Kelompok Unit Penunjang
3. Kelompok Unit Pembangkitan
4. Kelompok Unit Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban
5. Kelompok Unit Distribusi
6. Kelompok Unit Transmisi
7. Kelompok Unit Induk Proyek

PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo merupakan cabang yang dikhususkan untuk mengatur semua aspek kelistrikan di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Di Dalam PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo terdapat 3 bagian yaitu Bagian Keuangan yang terdiri dari 2 sub bagian lain yaitu Keuangan dan Akuntansi, kemudian Bagian Sumber Daya dan Umum (SDM), dan yang terakhir Satuan Pengawasan Internal (SPI).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Vendor. *Vendor* merupakan mitra bisnis yang melakukan kontrak kerja dengan PT. PLN (Persero). Arti dari *Vendor* yang lain menurut Adi Giantoro (2015) yaitu pihak ketiga dalam *supply chain* istilah dalam industri yang menghubungkan produk dari produsen untuk sampai ke tangan *customer* yang menjual barang kepada perusahaan untuk dijual kembali atau dipergunakan oleh *user* dari perusahaan tersebut.

User. *User* merupakan seseorang dari perusahaan, bisa dibidang juga sebagai perantara. *Vendor* melakukan hubungan terhadap *user* bukan terhadap perusahaan, sehingga hubungan *Vendor* dengan perusahaan merupakan hubungan secara tidak langsung. Ketika *Vendor* memberikan tagihan kepada *user* dan *user* telah melakukan verifikasi berkas, *user* akan meneruskannya ke bidang keuangan.

Keuangan. Hasil wawancara dengan Bpk. Ainul Yaqin (2018) menjelaskan bagaimana berkas diproses dibagian keuangan, Setelah bidang keuangan menerima berkas dari *user*, bidang anggaran akan mengecek jika anggaran sudah tersedia, dan berkas dari *Vendor* sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diatur dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara no : KEP-101/MBU/2002. Setelah itu jika sudah memenuhi syarat berkas akan diserahkan ke bidang Keuangan. Di bidang keuangan akan diserahkan di bagian pajak untuk mengecek faktur pajak, setelah perhitungan angka sudah benar maka berkas akan diserahkan ke bagian verifikasi pembayaran. Di bagian verifikasi pembayaran, berkas akan dicek ulang berdasarkan perjanjian kontrak, dan amandemen yang ada. Jika sudah memenuhi syarat, berkas akan dikirim ke bagian pembayaran. Di bagian pembayaran uang akan dicairkan dan dikirim secara manual kepada *Vendor* melalui transfer bank. Setelah transaksi terjadi, akan dilakukan pencatatan di bagian akuntansi. Berdasarkan Setio A.D (2014) pencatatan dapat digolongkan sebagai pencatatan yang dilakukan menggunakan metode akuntansi berbasis akrual. Mengambil kesimpulan dari Dhairolly Yafie (2013) basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui sebuah transaksi ketika transaksi tersebut telah terjadi tanpa mempertimbangkan jika telah terjadi perubahan kas atau tidak.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode penerapan IPTEKS yang diterapkan adalah menganalisis proses bisnis keuangan berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:0036.P/DIR/2016 tentang Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Anggaran di Lingkungan PT PLN (Persero).

3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Teknik penerapan IPTEKS yang diterapkan adalah melakukan analisis kesesuaian proses bisnis keuangan di PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:0036 P/DIR/2016 tentang Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Anggaran di Lingkungan PT PLN (Persero)

4. PEMBAHASAN

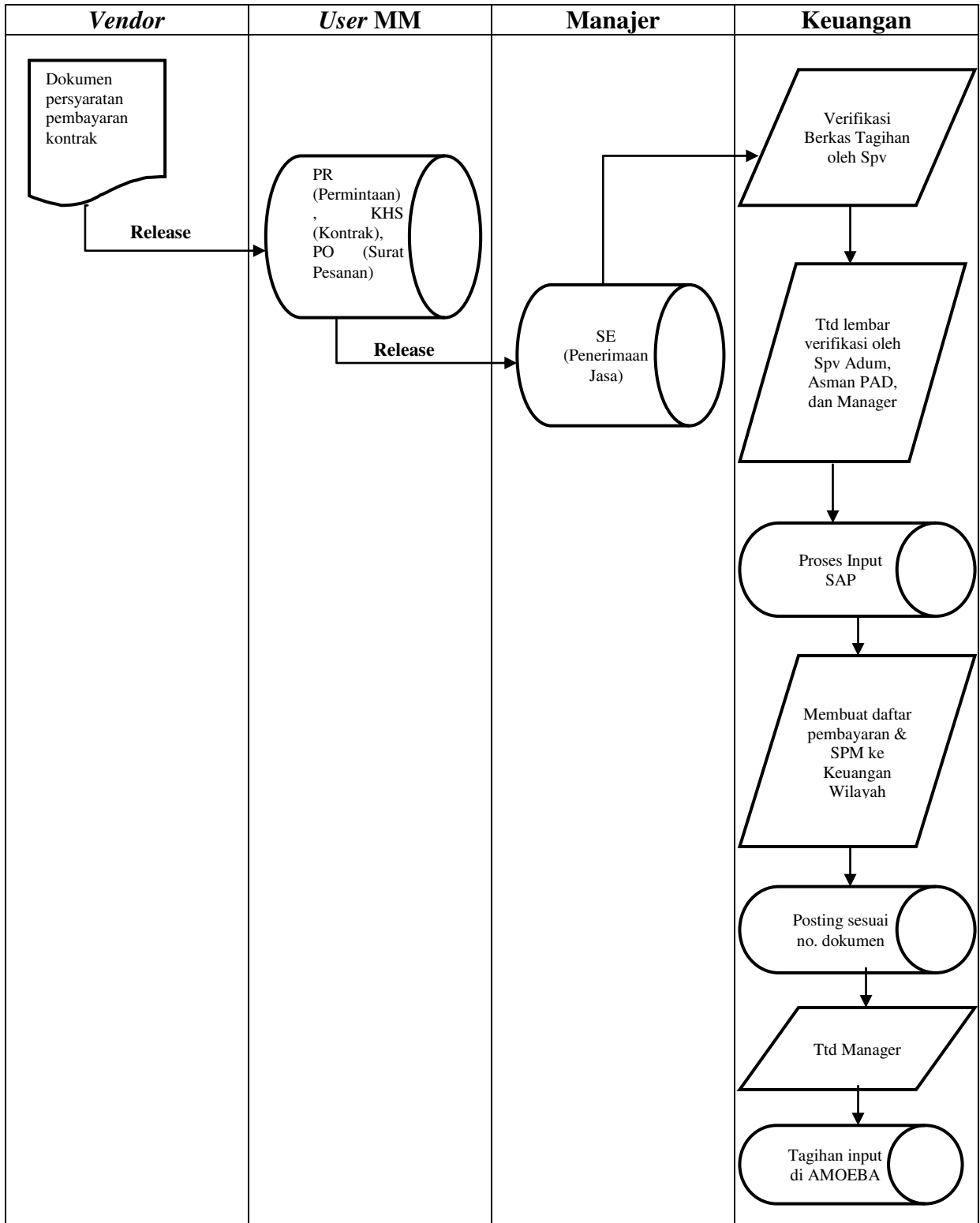
4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

Perusahaan Listrik Negara atau dikenal juga dengan PT. PLN (Persero) merupakan sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang kelistrikan di Indonesia. PT. PLN (Persero) memiliki banyak cabang salah satunya adalah PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo yang beralamat di Jln. Bethesda No.32 Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado. Unit Induk ini bertugas untuk mengurus segala aspek kelistrikan untuk wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo.

4.2. Pembahasan

Data yang diambil dari perusahaan berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Emerald Kussoy menjeleaskan tentang Proses Bisnis Keuangan sebagai berikut :

1. **Vendor.** melengkapi berkas tagihan untuk verifikasi pembayaran di keuangan :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanda tangan lengkap oleh Tim Pemeriksa.
 2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diparaf oleh Asman Pengguna.
 3. Berita Acara Pengoperasian ditanda tangani oleh Asman Pengguna.
 4. Berita Acara Pembayaran diparaf oleh Supervisor Administrasi Umum dan Asman Pelayanan dan Administrasi.
 5. Slip TUG 3 dan 4 lengkap tanda tangan.
 6. Tanggal Berita Acara Pembayarn, Kwitansi, Faktur Pajak dan Surat Permohonan Pembayaran
2. **User.** Proses Input SAP oleh *User* :
 1. Permintaan Pembelian (PR).
 2. Kontrak (KHS).
 3. Surat Pesanan (PO).
 4. Penerimaan Jasa (SE)Jika pengadaan material setelah release PO langsung bisa mencetak Slip Penerimaan
3. **Keuangan**
 1. Proses Verifikasi oleh Supervisor Administrasi Umum untuk Kelengkapan Berkas sesuai kontrak/SPK/PJ
 2. Tanda Tangan Lembar Verifikasi
 3. Proses input SAP Keuangan berdasarkan No. Faktur Pajak dan No. Purchase Order (PO)
 4. Membuat Daftar Pembayaran dan Surat Permohonan Pembayaran ke Keuangan Wilayah
 5. Posting sesuai No. Dokumen yang ada di Daftar Pembayaran oleh Supervisor Administrasi Umum
 6. Tanda Tangan Manajer Area
 7. Tagihan diinput di AMOBA



5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Proses bisnis keuangan di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo dilakukan oleh *User*. Sehingga hubungan *Vendor* dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo merupakan hubungan tidak langsung. *User* akan memproses berkas tagihan yang masuk di bidang anggaran dan keuangan. Setelah melewati semua bidang, data akan diinput dan pembayaran akan dilakukan secara manual oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo melalui transfer bank kepada rekening *Vendor*. Setelah transfer dilaksanakan akuntansi akan melakukan pencatatan menggunakan metode akrual basis.

5.2. Saran

1. Diharapkan Proses Bisnis Keuangan bisa lebih fleksibel sehingga pemrosesan sebuah berkas tagihan bisa lebih efektif dan efisien.
2. Menjalin komunikasi secara konstan dengan *Vendor*, untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Sunarya. 2012. *Analisa Proses Bisnis Berbasis Akuntansi*. Jurnal Ilmiah, 2(2), 65-78
- Giantoro, Adi. 2015. *Analisa Keputusan Pemilihan Vendor Dalam Proyek Konstruksi*. Jurnal Magister Teknik Sipil, 6
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 2002. *Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No : KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta : Menteri BUMN
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. *Profil Perusahaan PT. PLN (Persero)*. <http://bumn.go.id/pln/halaman/41/tentang-perusahaan.html>
- Kussoy, Emerald wawancara. 2018. *Wawancara mengenai Proses Bisnis Keuangan*. Jl. Bethesda 32
- Lubis, Satia. 2006. *Teori Pasar I : Pasar Monopoli*. Medan: USU
- Perusahaan Listrik Negara. *Profil Perusahaan PT. PLN (Persero)*. <http://www/pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>
- PT. PLN (Persero). 2016. *Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No 0036.P/DIR/2016 tentang Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Anggaran di Lingkungan PT PLN (Persero)*. Jakarta : Dirut
- Setio, A.D. 2014. *Kebijakan Akuntansi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)*. Jakarta : PT. PLN
- Yafie, Dhairolly. 2013. *Penerapan Basis Akrual pada Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia*. Jurnal Akuntansi UNESA 2 (1)
- Yaqin, Ainul wawancara. 2018. *Wawancara Mengenai Proses Bisnis Keuangan*. Jl, Bethesda 32